

# Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik

Civitas Consecratio  
Volume 2 Nomor 2 2022: 95-106  
© Penulis 2022  
DOI: 10.33701/cc.v2i2.2899



Pendidikan Politik Perempuan dalam Program 'Sekoper Cinta' di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

## *Improving Women's Representation in Public and Political Spheres*

*Women's Political Education in 'Sekoper Cinta' Program in Cimuja Village, Cimalaka District, Sumedang Regency, West Java Province*

Tiara Navy Argawidyanti<sup>1</sup>, Teguh Ilham<sup>2</sup>, Agni Grandita Permata Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat  
Jl. Soekarno Hatta No.576, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

<sup>2,3</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363

### Penulis Korespondensi

Teguh Ilham  
[t.ilham@ipdn.ac.id](mailto:t.ilham@ipdn.ac.id)

### Abstrak

Pemberdayaan perempuan diperlukan untuk menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi pada bidang sosial, ekonomi, dan politik yang masih terjadi hingga saat ini. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Maret 2022 ini bertujuan untuk meminimalisir berbagai permasalahan tersebut, yaitu dengan edukasi bagi 100 kaum perempuan di Desa Cimuja melalui sosialisasi terkait keterwakilan perempuan di ruang publik dan politik. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya-jawab, simulasi, dan kegiatan berkelompok. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program 'Sekoper Cinta' Provinsi Jawa Barat ini berjalan dengan baik dibuktikan dengan antusiasme peserta dalam mengikuti sosialisasi. Diharapkan program serupa dapat dilakukan pada daerah lain agar kesetaraan gender dapat terwujud secara nasional.

### Kata Kunci

program sekoper cinta; kesetaraan gender; keterwakilan perempuan; pemberdayaan perempuan; edukasi perempuan.

### Abstract

*Women's empowerment is needed to eliminate various forms of discrimination in the social, economic and political fields that still occur until today. The empowerment activities which were carried out on March 23 and 24 2022 aim to minimize these problems, namely by educating 100 women in Cimuja Village on the topic of women's representation in public and political sphere. The methods used are lectures, questions and answers, simulations, and group activities. This activity, which is part of the 'Sekoper Cinta' Program in West Java Province, went well, as evidenced by the enthusiasm of the participants. It is hoped that similar programs can be carried out in other regions so that gender equality can be achieved nationally.*

### Keywords

*'sekoper cinta' program; gender equality; representation of women; women empowerment; women's education.*



## 1. Pendahuluan

Perempuan memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Dengan adanya kesetaraan gender seperti saat ini, perempuan bebas berekspresi dan menentukan pilihan sesuai hati nuraininya. Tidak seperti dahulu yang dituntut di rumah, saat ini perempuan dapat bekerja di segala bidang bahkan pemerintahan. Perempuan dapat menjadi ibu, mengurus rumah tangga sekaligus bekerja, perempuan juga berhak mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini termaktub dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan adanya persamaan kedudukan bagi warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan atas hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi.

Adanya hak-hak perempuan tersebut pada kenyataannya tidak berjalan sesuai harapan. Peranan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia cenderung terlambat, salah satunya dikarenakan adanya stigma-stigma yang beranggapan bahwa perempuan masih berada di kelas bawah (Manembu, 2018). Selain itu, budaya patriarki yang masih melekat menyebabkan rendahnya jumlah perempuan yang berhasil menduduki jabatan-jabatan politik. Padahal, kehadiran perempuan dalam politik dan pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kaum perempuan itu sendiri.

Dalam bidang politik, misalnya, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Di antaranya adalah dengan menetapkan kebijakan *affirmative action* yaitu dengan memberikan kuota khusus bagi perempuan dalam bangku pemerintahan, yaitu dengan mensyaratkan partai politik untuk memastikan minimal 30% calon anggota legislatif berasal dari perempuan.

Secara statistik, terdapat peningkatan persentase perempuan yang menjadi anggota DPR RI dalam empat masa pemilu legislatif, di mana pada pemilu 2004 terdapat 11% anggota perempuan. Kemudian pada tahun 2009 terdapat sebesar 18%. Selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 17%. Terakhir, pada tahun 2019 mencapai 20% (KPU, 2020). Walaupun terdapat peningkatan, persentase ideal sebanyak 30% diprediksi masih memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Selain kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, pemerintah juga

mewajibkan partai politik untuk mengalokasikan bantuan dana parpol yang mereka terima dari negara, salah satunya sebanyak 60% bantuan harus dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik (PP Nomor 1, Tahun 2018). Namun, sayangnya dalam regulasi tersebut tidak diatur kewajiban bagi partai politik untuk memberikan porsi khusus bagi pendidikan politik perempuan. Akibatnya, upaya ekstra untuk memajukan perempuan dalam politik tidak banyak dilakukan oleh partai politik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amirullah (2015) misalnya menemukan bahwa dari ketiga partai politik peserta pemilu yang diteliti, tidak ada satupun partai yang memiliki kebijakan khusus dan program strategis terkait pemberdayaan politik perempuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi perempuan sesuai amanat kebijakan kuota 30%. Sebagian besar program pemberdayaan perempuan baru sebatas pada program-program penguatan ekonomi dan sosial, seperti: pelatihan kewirausahaan, keterampilan industri rumah tangga, penyuluhan kesehatan ibu dan anak (Posyandu) dan pengajian dan arisan ibu-ibu (Amirullah, 2015).

Sesungguhnya, berbagai kebijakan afirmatif bagi perempuan haruslah saling mendukung dan menguatkan. Kebijakan kewajiban calon perempuan sebanyak 30% jumlah calon tidak akan bermakna apa-apa tanpa upaya sistematis dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan perempuan dalam ranah politik. Usaha penguatan tersebut semestinya dimulai dengan program pendidikan politik bagi perempuan. Pendidikan politik adalah suatu usaha edukatif yang dilakukan secara sistematis dalam rangka membangun individu yang sadar akan politik, dan mampu bertanggung jawab dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Kartono, 2009). Dalam konteks ini, tujuan-tujuan politik dari perluasan keterlibatan perempuan baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif yaitu untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang ramah gender dapat diwujudkan.

Selain kewajiban utama partai politik sebagai pemain utama dalam demokrasi elektoral, pendidikan politik juga semestinya dilakukan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat, salah satunya akademisi. Berbagai program yang dilakukan bisa dalam bentuk seminar, *workshop*, sosialisasi baik daring maupun luring. Program yang dilakukan bisa dilakukan secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan pihak lain. Kegiatan

kolaboratif memiliki kelebihan, yaitu: lebih integratif, efisien, dan program lebih beragam.

Salah satu daerah yang memiliki program peningkatan pendidikan politik perempuan ini adalah Provinsi Jawa Barat melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta). 'Sekoper Cinta' merupakan program pelatihan dan pendidikan bagi kaum perempuan yang diketuai oleh Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan pemberdayaan kaum perempuan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Program ini menyoar kaum perempuan se-Jawa Barat, hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Selain memberikan pemahaman tentang politik dan pemerintahan, program ini diharapkan menjadi solusi dan langkah preventif untuk mengatasi masalah kekerasan dan diskriminasi yang cukup tinggi pada kaum perempuan.

Pelaksanaan program ini melibatkan banyak pihak, sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir pada saat menghadiri Wisuda Sekoper Cinta sekaligus Launching Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2022 di Gedung Negara pada tanggal 28 Juli 2022 bahwa program ini merupakan wujud dari kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa, perguruan tinggi, pengusaha dan lainnya. Sampai pada tanggal tersebut, sudah tercatat sebanyak 27.700 perempuan di Kabupaten Sumedang telah dilantik menjadi bagian Sekoper Cinta (Perizal, 2022).

Pelaksanaan program 'Sekoper Cinta' ini diharapkan memiliki dampak yang positif bagi perbaikan kondisi yang memarginalkan perempuan dan anak baik dalam kehidupan sosial maupun politik terutama di Kabupaten Sumedang.

Dilihat dari aspek sosial terutama dalam perlindungan bagi perempuan dan anak, di Kabupaten Sumedang masih menunjukkan jumlah kasus yang signifikan. Informasi yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumedang sebagaimana berita yang ditulis oleh Andriana (2022) yang dimuat Tribun Jabar menyatakan, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang terus meningkat. Hingga bulan Juli 2022, terdapat 32 kasus yang ditangani oleh P2TP2A. Dari 32 kasus itu, sebanyak 10 kasus adalah kekerasan terhadap perempuan. 22 sisanya kasus kekerasan terhadap anak.

Selain itu, dari aspek politik, keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Sumedang

pada berdasarkan hasil pemilihan anggota legislatif 2014 dan 2019 (Tabel 1) tidak jauh berbeda dengan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif level nasional, yaitu stagnan pada angka 18%.

**Tabel 1**  
Keanggotaan Perempuan pada DPRD Kabupaten Sumedang (Periode 2014-2019 dan 2019-2024)

Partai	Periode 2014-2019			Periode 2019-2024		
	2014	2015	2019	2019	2020	2024
PDI-P	2	10	12	3	8	11
Golkar	2	8	10	-	7	7
Gerindra	2	4	6	2	5	7
PKS	1	5	6	2	4	6
PPP	1	4	5	1	6	7
Demokrat	1	3	4	-	-	-
PAN	-	3	3	1	3	4
Hanura	-	1	1	-	-	-
PKB	-	2	2	-	8	8
PBB	-	1	1	-	-	-
Total	9	41	50	9	41	50

Sumber: Susanto (2022)

Oleh karena itu, salah satu upaya krusial yang dapat dilakukan dalam memperbaiki berbagai ketimpangan pada berbagai aspek yang dialami oleh perempuan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan pendidikan politik bagi perempuan.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk peningkatan pendidikan politik perempuan telah cukup banyak dilakukan. Beberapa di antaranya seperti yang dilakukan oleh Destemi & Hartati (2020) yang melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik terhadap kelompok/ organisasi/ komunitas perempuan. Kegiatan yang berbentuk ceramah ini dilakukan di Kelurahan Pijoan Provinsi Jambi ini fokus pada materi yang berkaitan dengan peran perempuan dalam pembangunan dan politik, terutama pada penggunaan hak pilih dalam pemilu, dan sosialisasi kebijakan responsif gender. Kegiatan ini dilaksanakan dengan lancar dengan tingginya tingkat kehadiran peserta. Selanjutnya yaitu kegiatan yang dilakukan Isti'annah dan Yunita (2022) yang melakukan penguatan kesadaran politik kaum remaja perempuan dalam hal ini para santriwati di Madrasah Mu'allimat

Muhammadiyah Yogyakarta. Materi yang dibawakan berfokus pada strategi pencapaian kuota minimal 30% perempuan di lembaga legislatif. Kegiatan ini tidak hanya penyampaian materi, akan tetapi diikuti dengan simulasi praktik sebagai juru kampanye yang menggambarkan kemampuan perempuan mempromosikan diri dalam perjuangan mewujudkan kuota ideal persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tersebut.

Kegiatan selanjutnya dilakukan oleh Haryani dan Nurhaeni (2021) yang memberikan materi yang berkaitan dengan wawasan gender, wawasan pendidikan politik dan urgensi perempuan dalam politik bagi perempuan pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Karanganyar. Kegiatan yang diikuti luring ini terkendala kondisi pandemi sehingga diikuti secara terbatas oleh 28 peserta. Kegiatan pengabdian selanjutnya yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Alfiah dan Rika (2022) yang menasar salah satu kelompok arisan wanita yang ada di RT 01 RW 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng Dalam Kabupaten Sumenep. Metode pengabdian pendidikan politik dilakukan dengan sosialisasi terkait politik dan kebijakan pengarusutamaan gender, serta pelatihan dan pendampingan untuk memberi pemahaman pentingnya partisipasi perempuan dalam penggunaan hak pilih terutama pemilihan kepala desa. Walaupun jangkauan pengabdian pada tingkat RT namun kegiatan sosialisasi ini diikuti cukup banyak partisipan yaitu sebanyak 40 orang.

Sama halnya dengan berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pada berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya yaitu berfokus pada lokus yang relatif kecil, kegiatan sosialisasi pada program ‘Sekoper Cinta’ ini dilaksanakan pada tingkat desa, yaitu di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, keterbatasan umum yang dihadapi adalah kondisi pandemi yang menyebabkan diperlukannya pengaturan khusus sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran kegiatan.

Namun, berbeda dengan kegiatan-kegiatan di atas di mana sebagian besar narasumber berasal dari satu pihak, kegiatan sosialisasi dalam program ‘Sekoper Cinta’ ini tidak hanya melibatkan kampus yang melakukan pengabdian, tetapi juga pihak lain, seperti bidan desa dan Tim PKK desa. Keberagaman pemateri ini memberikan banyak perspektif sesuai dengan kompetensi masing-masing karena permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sangat kompleks, tidak hanya politik, tetapi juga ekonomi, sosial, dan kesehatan. Selain itu, kegiatan ‘Sekoper

Cinta’ ini merupakan kegiatan yang terintegrasi yang diorganisasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Kamil dengan melibatkan berbagai pihak dalam memberikan materi sosialisasi. Sebagai komponen penting dari masyarakat, kampus juga melibatkan diri untuk menyukseskan kegiatan ini. IPDN sebagai perguruan tinggi kepomongprajaan yang berada di Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab moral dalam mendukung program yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah kegiatan peningkatan pengetahuan politik perempuan. Selain merupakan sarana praktik bagi praja IPDN terutama dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan politik, keikutsertaan dalam Program ‘Sekoper Cinta’ ini juga dimaksudkan untuk menciptakan politik yang inklusif.

Salah satu lokasi pelaksanaan program ‘Sekoper Cinta’ ini adalah di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Kader PKK Desa Cimuja, Bidan Desa Cimuja, dan Tim dari IPDN yang sedang melaksanakan Praktik Lapangan. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (hari) yaitu pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 bertempat di Aula Kantor Desa Cimuja

Berdasarkan hal tersebut, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Praktik Lapangan ini Tim IPDN hadir sebagai mitra pemerintah untuk memberikan edukasi bagi kaum perempuan khususnya di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka Provinsi Jawa Barat dengan melakukan sosialisasi mengenai keterwakilan perempuan dalam politik agar kaum perempuan memiliki ketertarikan dan pengetahuan dasar untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintahan serta dapat menjadi agen pembangunan Nasional.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mendeskripsikan kegiatan pengabdian mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan diulas secara khusus terkait materi Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik yang dibawakan oleh Tim pengabdian masyarakat dari IPDN.

## 2. Metode

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing tahapan.

## Tahap 1: Persiapan

Tahap persiapan ini meliputi kegiatan rapat koordinasi dan persiapan keperluan acara pelatihan. Tim IPDN bersama pemerintah desa membentuk tim panitia untuk mempersiapkan acara tersebut. Tim panitia melakukan koordinasi dengan mitra pengabdian untuk mempersiapkan acara dengan melakukan rapat koordinasi dan fiksasi acara. Persiapan kegiatan, meliputi pemilihan ruangan, fasilitas pendukung, seperti: kursi, meja, *sound system*, infokus. Selain itu ditentukan juga jumlah peserta, yaitu 100 peserta yang terdiri dari perempuan dari berbagai kalangan di Desa Cimuja. Narasumber yang akan memberikan pelatihan juga ditentukan, yang akan membawakan tujuh materi yang berbeda.

Dalam persiapan ini, Pemerintah Desa Cimuja dengan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumedang mempersiapkan semua fasilitas pendukung tersebut beserta konsumsi. Sementara itu, tim pengabdian IPDN membantu dalam mengajak masyarakat yang diundang untuk dapat menghadiri kegiatan 'Sekoper Cinta' ini dan membawakan materi yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam ruang publik dan politik.

## Tahap 2: Pelaksanaan

Kegiatan 'Sekoper Cinta' dilaksanakan selama 2 (hari) yaitu pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 di Aula Kantor Desa Cimuja. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya-jawab, serta simulasi. Selain itu, disela-sela pemberian materi fasilitator juga memberikan kegiatan yang menghibur menyanyikan *Jinggel Sekoper Cinta*, *Wanita Kuat*, *Tandang Nyandang Sorangan*, dan permainan-permainan yang dapat melatih kekompakan lainnya. Selama kegiatan peserta juga dibagi menjadi 10 kelompok yang diberi nama dengan 10 perempuan tokoh politik di Indonesia, seperti: *Khofifah Indar Parawansa*, *Megawati Soekarno Putri*, *Tri Rismaharini*, dan sebagainya. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 (seratus) orang perempuan yang terdiri dari Ibu Rumah Tangga dan anak muda di Desa Cimuja. Dalam menyampaikan materi, penulis berkolaborasi dengan perangkat desa sebagai fasilitator yang di antaranya terdiri dari bidan desa dan kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Adapun materi yang dibawakan oleh penulis, yaitu meliputi Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik. Dalam hal ini, poin yang disampaikan meliputi

konsep kesetaraan, pengertian agen perubahan, peran perempuan sebagai agen perubahan, peran perempuan sebagai agen pembangunan, dan sosok perempuan inspiratif.

## Tahap 3: Evaluasi

Tahapan ini merupakan tahapan yang tidak kalah pentingnya, karena evaluasi diperlukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta pelatihan. Pada akhir acara penulis meminta beberapa warga untuk mengulas kembali secara singkat mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun indikator yang penulis tetapkan sebagai penilaian capaian sosialisasi keterwakilan perempuan di ruang publik dan politik antara lain:

1. Peserta dapat menjelaskan peran perempuan dalam pembangunan.
2. Peserta dapat menjelaskan hak-hak kaum perempuan.
3. Adanya peningkatan minat peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan politik maupun pemerintahan.

Evaluasi ketiga hal tersebut tidak dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, namun hanya dalam bentuk pertanyaan lisan dari pemateri kepada beberapa peserta yang dilakukan secara acak.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan *Sekoper Cinta* (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita) diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Cimuja, *Euis Naryati*. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan 100 (seratus) orang perempuan di Desa Cimuja berjalan dengan tertib dan interaktif. Kegiatan inipun disambut apresiasi oleh tim monitoring dari Kecamatan Cimalaka dikarenakan Cimuja berhasil menjadi satu-satunya desa yang mengumpulkan peserta pelatihan sesuai target yaitu sejumlah 100 (seratus) orang peserta.

### 3.1. Keterlibatan Perempuan dalam Program Sekoper Cinta

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kegiatan dalam Program 'Sekoper Cinta' ini tidak hanya berkaitan dengan materi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ruang publik dan politik, tetapi juga berbagai materi yang mendukung upaya untuk meningkatkan keberdayaan

perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Materi-materi tersebut, antara lain:

*Pertama*, keterampilan dasar perempuan. Materi yang berkaitan dengan tema ini, seperti: perencanaan dan pencatatan keuangan keluarga, konsep pola gizi seimbang dan pencegahan *stunting*, keterampilan minimal terkait pemenuhan sandang keluarga, pengetahuan terkait konsep cantik, sehat, dan indah, pengetahuan mengenai beberapa cara merawat diri, penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga, dan pengelolaan sampah rumah tangga.

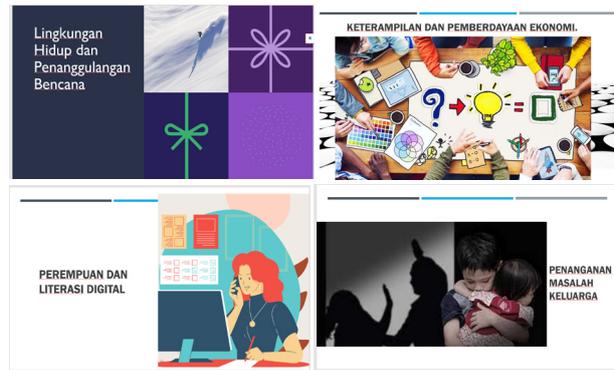
*Kedua*, kesehatan keluarga. Materi yang berkaitan dengan tema ini, seperti: pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan kecil dalam keluarga, penyakit menular dan penyakit tidak menular, Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang meliputi: hak & kewajiban, peran & layanan JKN.

*Ketiga*, penanganan masalah keluarga. Materi yang berkaitan dengan tema ini, seperti: jenis-jenis permasalahan yang sering muncul pada keluarga, penyebab munculnya permasalahan keluarga, dan peran perempuan dalam menangani masalah keluarga.

*Keempat*, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Materi yang berkaitan dengan tema ini, seperti: pengelolaan air bersih, cara menjaga sumber air dari pencemaran, kesiapan keluarga hadapi bencana, dan berlatih simulasi menghadapi bencana.

*Kelima*, Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi. Materi yang berkaitan dengan tema ini, seperti: konsep terkait pemberdayaan ekonomi, tujuan pentingnya perempuan terlibat dalam mendukung ekonomi keluarga, dan apa yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk mendukung perekonomian keluarga.

*Keenam*, perempuan dan literasi digital. Materi yang berkaitan dengan tema ini, seperti: konsep literasi digital, gerakan perempuan dalam literasi digital nasional perlu dimasifkan, upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan.



**Gambar 1.** Enam Materi yang disampaikan dalam Program 'Sekoper Cinta' pada tanggal 23 s.d. 24 Maret 2022 di Desa Cimuja, Kabupaten Sumedang

Sedangkan, materi yang dibawakan oleh tim pengabdian masyarakat IPDN berkaitan dengan Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik. Beberapa poin yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Alasan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pada bagian ini fasilitator menjelaskan bahwa perempuan tidak berbeda dengan laki-laki dalam hal kesempatan menjadi pemimpin dan agen perubahan baik di dalam keluarga atau di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk berusaha ikut serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan agar bisa memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perempuan.
2. Pengertian agen perubahan. Pada bagian ini fasilitator menjelaskan pengertian dari kata agen secara terminologis dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selain itu juga dijelaskan kemampuan apa saja yang perlu dimiliki oleh perempuan sebagai agen atau penghubung antara sumber perubahan (inovasi, kebijakan publik, nilai-nilai, dll) dengan sistem masyarakat yang menjadi target perubahan.
3. Peran perempuan sebagai agen perubahan dalam lingkungan sekitar. Pada bagian ini fasilitator menjelaskan peran penting yang diemban perempuan pada berbagai aspek kehidupan, terutama di tengah-tengah keluarga pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
4. Peran perempuan dalam pembangunan. Pada bagian ini fasilitator menjelaskan konsep pembangunan, kondisi yang dihadapi saat ini, dan berbagai program pembangunan pemerintah yang memerlukan peran perempuan, seperti

musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) dan PKK.

5. Memberikan contoh sosok perempuan yang menginspirasi serta dampaknya bagi lingkungan sekitar. Pada bagian ini fasilitator memberikan beberapa contoh perempuan tokoh politik dan pemerintahan yang menginspirasi baik pada level nasional dan lokal beserta berbagai tantangan yang berhasil dilalui dan kontribusinya kepada masyarakat.



**Gambar 2.** Penyampaian materi dengan tema Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik yang disampaikan dalam Program 'Sekoper Cinta' pada tanggal 24 Maret 2022 di Desa Cimuj, Kabupaten Sumedang



**Gambar 3.** Cuplikan materi dengan tema Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik yang disampaikan dalam Program 'Sekoper Cinta' pada tanggal 24 Maret 2022 di Desa Cimuj, Kabupaten Sumedang

Dinamika kegiatan penyampaian materi berjalan dua arah dibuktikan dengan adanya respon yang baik dari peserta pelatihan selama kegiatan berlangsung. Peserta juga antusias memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, dan berani mengutarakan pendapatnya.

Kegiatan pelatihan ini tidak hanya penyampaian ceramah, tetapi juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menghibur, seperti menyanyikan *Jinggel Sekoper Cinta*, *Wanita Kuat*, *Tandang Nyandang Sorangan*, dan permainan-permainan yang

dapat melatih kekompakan lainnya. Hal ini dilakukan agar peserta pelatihan tidak jenuh selama kegiatan berlangsung. Gambar 4 ini memperlihatkan peserta antusias menyanyikan beberapa lagu yang dipandu fasilitator.



**Gambar 4.** Kegiatan Selingan dengan Menyanyikan *Jinggel Sekoper Cinta*, *Wanita Kuat*, *Tandang Nyandang Sorangan* dalam Program 'Sekoper Cinta' pada tanggal 24 Maret 2022 di Desa Cimuj, Kabupaten Sumedang

Kegiatan yang dibawakan oleh fasilitator juga dititikberatkan pada diskusi-diskusi yang bersifat *sharing sehingga peserta pelatihan dapat merasa nyaman untuk* mengutarakan pendapatnya, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.



**Gambar 5.** Kegiatan Diskusi dalam Program 'Sekoper Cinta' pada tanggal 24 Maret 2022 di Desa Cimuj, Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil pengamatan, dari 100 (seratus) orang peserta pelatihan, sekitar 50 persen peserta yang aktif mengikuti permainan-permainan, diskusi, dan simulasi yang diberikan. Angka partisipasi ini sebenarnya dapat dimaksimalkan, namun terkendala oleh tempat berlangsungnya kegiatan yang terbatas. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut penulis bekerja sama dengan perangkat desa untuk menambahkan

kegiatan baru yang dapat dilakukan oleh semua peserta pelatihan melalui kegiatan kelompok. Penulis memutuskan untuk membagi keseratus orang tersebut ke dalam 10 (sepuluh) kelompok wanita yang namanya sudah sangat familiar dalam dunia politik dan pemerintahan seperti Megawati Soekarnoputri, Tri Rismaharani, Susi Pudjiastuti, Retno Marsudi, Siti Nurbaya, Sri Mulyani, Khofifah Indar Parawansa, Puan Maharani, Iriana Joko Widodo, dan Atalia Praratya Ridwan Kamil.



**Gambar 6.** Kegiatan Kelompok dalam Program 'Sekoper Cinta' pada tanggal 24 Maret 2022 di Desa Cimuja, Kabupaten Sumedang

Pada akhir sosialisasi dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kegiatan ini bermanfaat bagi peserta. Berdasarkan hasil ulasan singkat peserta pelatihan mengenai keterwakilan perempuan di ruang publik dan politik yang telah disampaikan, didapatkan hasil bahwa lima dari tujuh peserta pelatihan dari Desa Cimuja yang dipilih secara acak sudah mengetahui peran dan hak-hak perempuan dalam politik dan pemerintahan.



**Gambar 7.** Kegiatan penyampaian ulasan singkat dari peserta pelatihan dalam Program 'Sekoper Cinta' pada tanggal 24 Maret 2022 di Desa Cimuja, Kabupaten Sumedang

Kegiatan Sekoper Cinta diharapkan berhasil menciptakan wanita-wanita tangguh sebagai ujung tombak pembangunan yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu, juga diharapkan kegiatan ini awal dari meningkatnya keaktifan perempuan dalam politik. Beberapa peserta menyatakan akan menyampaikan ilmu yang didapat selama pelatihan kepada anggota keluarga lainnya. Mereka berharap agar kegiatan ini terus terlaksana, dan mereka pun meyakinkan kami untuk selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya.

### 3.2. Perempuan di Ruang Publik dan Politik

Isu-isu keperempuanan masih menjadi tantangan tersendiri di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Misalnya pada kasus perceraian, pada tahun 2015 angka talak dan cerai di Jawa Barat mencapai 70.293 kasus. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat menempati urutan ketiga setelah Provinsi Jawa Timur yang memiliki 87.475 kasus dan Provinsi Jawa Tengah dengan 71.901 kasus. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah kasus naik menjadi 75.001 kasus dan menempati posisi kedua terbanyak setelah Provinsi Jawa Timur dengan 86.491 kasus. Tren kenaikan terus terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah kasus naik menjadi 79.047 kasus, masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur dengan 84.839 kasus.

Hal yang memprihatinkan adalah selama tiga tahun tersebut di Provinsi Jawa Barat trennya mengalami kenaikan, sementara di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah trennya menurun (Hibatullah, 2018). Selain perceraian, permasalahan yang dihadapi perempuan di Provinsi Jawa Barat juga berkaitan dengan tingginya kasus kekerasan kepada perempuan. Pada tahun 2021, berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 58.395 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Jawa Barat. Jumlah itu menjadi yang terbanyak dibandingkan di provinsi lainnya. Jumlah itu naik 49,74% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 226.062 kasus (Bayu, 2022). Kasus lainnya, misalnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga yaitu *stunting*.

Dalam kasus ini, Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi dengan angka Balita *stunting* terbanyak di Indonesia. Data SSGI 2021 menyebutkan prevalensi *stunting* Provinsi Jawa Barat mencapai 24,5 persen,

sedikit di atas rata-rata angka stunting nasional, yaitu 24,4 persen (Sandes, 2022).

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Sumedang. Sebagaimana disinggung pada bagian awal tulisan ini, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai cukup tinggi dimana semenjak Januari hingga Juli 2022 terdapat 32 kasus kekerasan kepada perempuan dan anak (Andriana, 2022) Pada kasus *stunting*, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berstatus kuning atau angka prevalensi berkisar 20-30 persen (Rizal, 2022).

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dan dialami oleh perempuan diharapkan akan dapat terselesaikan jika perempuan menjadi berdaya. Kofi Annan pernah menekankan, “studi demi studi telah mengajarkan kita, tidak ada alat untuk pembangunan yang lebih efektif daripada pemberdayaan perempuan.” Lebih lanjut dijelaskan, jika perempuan terlibat dalam politik, maka permasalahan gizi buruk, pencegahan HIV/AIDS, dan putus sekolah akan berpeluang dapat terselesaikan (Adler, 2018).

Keterlibatan perempuan dalam politik di Kecamatan Cimalaka sudah mulai terlihat. Dari 14 desa yang ada, terdapat dua kepala desa perempuan, yaitu di Desa Cibereum Wetan dan Desa Cimuja sendiri, lokasi dimana kegiatan pengabdian dilakukan. Pada pemilihan Kepala Desa Cimuja yang terakhir ini, terpilih ibu Euis Naryati, seorang tokoh perempuan sebagai kepala desa untuk masa bakti 2018-2024 (Nuryama, 2021). Walaupun demikian, keterpilihan perempuan dalam berbagai jabatan politik di berbagai tingkat pemerintahan masih perlu ditingkatkan, termasuk pada lembaga legislatif dimana keterwakilan perempuan masih minim (lihat tabel 1).

Menciptakan kondisi di mana perempuan memiliki keberdayaan membutuhkan perubahan konsepsi sosial masyarakat yang patriarkis dan untuk mempercepatnya dibutuhkan regulasi yang afirmatif bagi perempuan. Upaya melalui jalur pendidikan telah lama dilakukan oleh para tokoh perempuan, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari sejarah, upaya untuk memberdayakan perempuan telah muncul dari perempuan itu sendiri. Raden Dewi Sartika, misalnya, yang pada tahun 1904 telah mendirikan *Sakola Istri* atau Sekolah Perempuan. Sekolah yang berlokasi di Jalan Keutamaan Istri No. 12 Balong Gede – Regol - Bandung ini masih dipertahankan hingga saat ini dan sekarang bernama Sekolah Dewi Sartika (Agustina, 2010) Sementara itu, pada tahun 1906 di Cianjur juga

dibuka *Sakola Keutamaan Istri* yang dipimpin oleh Siti Jenab. Selain itu, di Garut terdapat juga Sekolah Keutamaan Istri yang didirikan oleh Raden Ayu Lasminingrat pada tahun 1907 di Pendopo Kabupaten Garut. Hampir sama dengan sekolah yang didirikan sebelumnya, sekolah ini juga mengajarkan baca tulis dan pemberdayaan perempuan (Harpiyah. et. al, 2018).

Saat ini permasalahan perempuan tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk memberikan pendidikan kepada perempuan masih terus diupayakan hingga sekarang. Salah satu upaya yang saat ini sedang digencarkan adalah melalui Program 'Sekoper Cinta' yang didirikan pada tahun 2019 dan saat ini diketuai oleh Atalia Praratya Ridwan Kamil. Sekoper Cinta merupakan salah satu program pemerintah Jawa Barat untuk mewujudkan perempuan yang berdaya Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat. Program ini diselenggarakan secara sistematis karena kegiatannya berkelanjutan dan berpedoman kepada berbagai modul yang disusun. Berbagai macam materi tersebut disampaikan oleh para fasilitator yang direkrut secara selektif.

Berbeda dengan berbagai sekolah perempuan awal sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, 'Sekoper Cinta' ini merupakan bagian dari Pendidikan Non Formal. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 Paragraf 2, pendidikan non-formal diartikan sebagai saluran pendidikan yang melampaui bentuk pendidikan formal dan terstruktur. Program sekolah perempuan ini, walaupun bersifat non-formal, akan tetapi memiliki keberlanjutan dan materinya diberikan secara terstruktur dan sistematis sehingga para peserta benar-benar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif. Materi-materinya diberikan selain dalam bentuk ceramah dan modul yang terstandar juga dalam bentuk video yang menarik dan informatif.

Secara umum, 'Sekoper Cinta' ini didirikan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dialami oleh perempuan dengan merujuk pada *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini ditandatangani pada 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB.

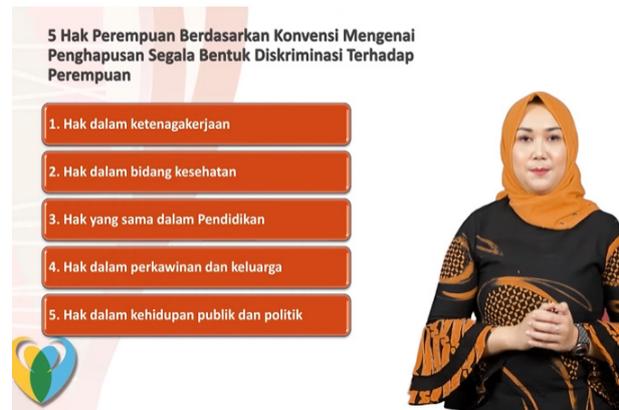
Memberikan hak kepada perempuan bukanlah sebuah bentuk ‘hadiah’, melainkan karena memang hak itu sudah selayaknya dimiliki oleh kaum perempuan sebagai bentuk Hak Asasi Manusia (HAM). Maka sebetulnya kata yang tepat bukan ‘memberikan’ melainkan ‘mengembalikan.’ Sebab bisa jadi hak yang melekat dalam diri perempuan sebelumnya telah diambil (bahkan mungkin secara paksa) oleh pihak-pihak tertentu melalui stigma, stereotip, tradisi atau peraturan-peraturan yang bersifat patriaki atau maskulin.

Berbagai hak yang diperjuangkan tersebut antara lain: Hak dalam ketenagakerjaan, Hak dalam bidang kesehatan, Hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, Hak dalam kehidupan publik dan politik. Kelima hak ini dianggap sebagai hak-hak yang seringkali tidak didapatkan secara adil oleh perempuan sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan dimana perempuan menjadi korban. Misalnya pada bidang ketenagakerjaan, perempuan seringkali mendapatkan upah yang jumlahnya di bawah laki-laki. Selain itu, hak cuti hamil dan melahirkan seringkali tidak diberikan secara cukup. Secara lengkap, hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

Kemudian hak dalam kesehatan, misalnya larangan aborsi termasuk yang membahayakan kondisi kesehatan dan nyawa ibu, atau mendapatkan layanan yang layak bagi perempuan yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. Selanjutnya adalah hak yang sama dalam bidang pendidikan, misalnya memastikan bahwa perempuan memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana laki-laki. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian hak dalam perkawinan dan keluarga. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan

persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri. Terakhir, yaitu hak dalam kehidupan publik dan politik. Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Selain penyampaian materi yang diberikan secara langsung hingga pada tingkat desa, sebagaimana yang dilakukan oleh tim pengabdian pada Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022, masyarakat dapat juga mendapatkan informasi dan materi pelatihan yang diunggah pada kanal YouTube ‘Sekoper Cinta Jabar’. Hingga tulisan ini disusun telah diunggah sebanyak 21 video pembelajaran yang dapat diakses secara gratis. Selain pada kanal resminya ini, berbagai video yang berkaitan dengan materi dan kegiatan ‘Sekoper Cinta’ juga dapat dilihat di kanal YouTube ‘Atalia Kamil’, sang Ketua Umum Program ‘Sekoper Cinta’ dan beberapa kanal yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat umum.



Sumber: Kanal Youtube (Sekoper Cinta Jabar, 2022)

**Gambar 8.** Salah Satu Materi Pembelajaran yang Diunggah pada Kanal Resmi ‘Sekoper Cinta Jabar’ dengan Judul ‘sekoper cinta episode 21 2022’.

Sebagaimana protokol yang diatur di dalam modul, penyampaian materi oleh fasilitator ditujukan agar para peserta selain menambah tingkat pengetahuan (kognisi), juga harus bisa memiliki keterampilan dan membentuk sikap (misalnya dari enggan menjadi mau).

**Tabel 2**  
Proses Belajar dan Metode yang digunakan dalam Pembelajaran 'Sekoper Cinta'

Tujuan	Metode belajar
Meningkatkan pengetahuan	Ceramah, Membaca, Menonton, Tanya-Jawab.
Meningkatkan keterampilan	Bermain Peran, bernyanyi, praktik dan latihan.
Merubah sikap (dari tidak mau menjadi mau)	Diskusi dan berbagi, Melihat Contoh, tugas berkelompok, Refleksi.

Sumber: dimodifikasi dari Nurlatifah, Sumpena, Hilman (2020).

Dengan penggunaan berbagai metode pembelajaran dan materi yang tersusun secara sistematis tersebut diharapkan mampu untuk memaksimalkan *output* dan *outcome* dari program ini. Program ini mampu menarik minat perempuan yang ada di Desa Cimuja untuk berpartisipasi, terbukti dengan keberhasilan Desa Cimuja dalam menghadirkan 100 peserta sehingga menjadikan Desa Cimuja sebagai desa dengan jumlah peserta terbanyak se Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Pada tingkat kabupaten, pada tahun 2021 Kabupaten Sumedang juga dinobatkan sebagai "Best Practice" atau pelaksana terbaik program Sekoper Cinta di Provinsi Jawa Barat (ruber.id, 2022). Berbagai macam prestasi, baik yang diperoleh oleh Desa Cimuja dan Kabupaten Sumedang dalam menjalankan program provinsi ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menyiapkan program dengan sebaik-baiknya dan masyarakat dalam berpartisipasi. Tanpa adanya keseimbangan dari kedua pihak tersebut, maka kegiatan ini tidak akan berhasil dilaksanakan.

## 4. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan kolaboratif dalam Program 'Sekoper Cinta' yang dilaksanakan di Desa Cimuja pada tanggal 23 Maret dan 24 Maret 2022 mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan berjalan dengan lancar. Penyampaian materi berkaitan dengan Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik yang dibawakan oleh Tim IPDN diikuti dengan baik oleh semua peserta. Walaupun hingga pertengahan kegiatan sebagian peserta tampak kurang aktif, akan tetapi dengan metode pelatihan membagi peserta menjadi berkelompok membuat seluruh peserta menjadi antusias. Ini menunjukkan bahwa pemilihan metode pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan minat dan keaktifan peserta sosialisasi. Penyampaian materi secara satu arah yang didominasi oleh pemateri tidak akan efektif sehingga perlu diintegrasikan dengan metode lain,

seperti bekerja berkelompok dan juga hiburan seperti bernyanyi. Lancarnya penyelenggaraan kegiatan ini juga menentukan kesuksesan acara yang terlihat dari hasil evaluasi kegiatan.

Penyampaian materi yang berkaitan dengan pentingnya keterwakilan perempuan dalam ruang publik dan politik ini penting mengingat kondisi ketimpangan yang saat ini dihadapi oleh perempuan baik pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya, khususnya di Kabupaten Sumedang dan umumnya di Provinsi Jawa Barat. Dengan terwakilannya perempuan di ruang publik dan politik, maka diharapkan berbagai kebijakan yang pro *gender equality* dapat diwujudkan. Ketika berbagai kebijakan telah ramah gender, maka berbagai persoalan terutama yang umumnya dihadapi oleh perempuan, seperti kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, diskriminasi, dan sebagainya dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, ketika sudah tercapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki maka berbagai kebijakan dan program afirmatif tidak diperlukan lagi sehingga tidak terdapat perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki.

Diharapkan, program serupa dapat direplikasi dan dimodifikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia agar upaya untuk menciptakan keberdayaan perempuan untuk menunjang pembangunan nasional dapat terwujud dengan baik dan dalam waktu dekat.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) IPDN yang telah mendanai kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

## 5. Referensi

- Adler, A. (2018). Why Women in Politics? . *Women Deliver*. <https://womendeliver.org/why-women-in-politics/>
- Agustina, F. (2010). *100 Great Women: Suara Perempuan yang Menginspirasi Dunia*. Jogja Bangkit Publisher.
- Alfiah, N., & Rika, D. L. (2022). Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan di RT 01 RW 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng Dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2021. *Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 23–31. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2022.3.1.23-31>

- Amirullah. (2015). Pendidikan Politik Perempuan. *Visipena Journal*, 7(1), 104–127. <https://doi.org/10.46244/visipena.v7i1.299>
- Andriana, K. (2022). Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak Naik, P2TP2A Sumedang Nilai Ini Paling Memprihatinkan. *Tribunjabar.Id*. <https://jabar.tribunnews.com/2022/07/18/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-naik-p2tp2a-sumedang-nilai-ini-paling-memprihatinkan>
- Bayu, D. (2022). Kekerasan terhadap Perempuan Terbanyak di Jawa Barat pada 2021. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kekerasan-terhadap-perempuan-terbanyak-di-jawa-barat-pada-2021>
- Destemi, S., & Hartati. (2020). Pendidikan politik perempuan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi tahun 2020. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 265–268. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.265-268>
- Harpiah, D., Wardah, E. S., & Fauziyah, S. (2018). Peran Raden Ayu Lasminingrat dalam Mengembangkan Sekolah Keutamaan Istri Tahun 1907-1948. *Tsaqofah*, 16(2), 223. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v16i2.3158>
- Haryani, T. N., & Nurhaeni, I. D. A. (2021). Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Perempuan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Pengamas*, 4(2). <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/pengamas/article/view/2373>
- Hibatullah, T. A. (2018). Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi. *SmartLegal.Id*. <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/>
- Isti'anah, Z., & Yunita, A. (2022). Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan Melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 719–730. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/6603>
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Mandar Maju.
- KPU. (2020). Keterwakilan Perempuan pada Kursi Legislatif. Jakarta. KPU.
- Manembu, A. E. (2018). Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 1–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/16329/15832>
- Nurlatifah, D. A., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Proses Pemberdayaan Perempuan pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta). *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9463>
- Nuryama, R. (2021). Daftar Nama Kepala Desa di Kabupaten Sumedang Per Tahun 2021. *TINews.Com*. <https://www.tinewss.com/sumedang-news/pr-1851737483/daftar-nama-kepala-desa-di-kabupaten-sumedang-per-tahun-2021>
- Perizal, S. F. (2022). *Bupati: Sekoper Cinta Sumedang Bakal Jadi Role Model Di Daerah Lain*. <https://www.rmoljabar.id/bupati-sekoper-cinta-sumedang-bakal-jadi-role-model-di-daerah-lain>
- Rizal, M. (2022). Ini 4 Daerah di Jawa Barat dengan Angka Stunting di Atas 30 Persen. *Sinar Jabar*. <https://www.sinarjabar.com/jawa-barat/pr-2912922667/ini-4-daerah-di-jawa-barat-dengan-angka-stunting-di-atas-30-persen>
- ruber.id. (2022). Sekoper Cinta Ada di 277 Desa se-Kabupaten Sumedang. *Sumedang.Ruber.Id*. <https://sumedang.ruber.id/sekoper-cinta-ada-di-277-desa-se-kabupaten-sumedang/>
- Sandes, R. (2022). 218.286 Balita Stunting di Jabar, Akses Makanan Bergizi Salah Satu Penyebab. *Lubuklinggaukota.Go.Id*. <https://dppkb.lubuklinggaukota.go.id/2022/08/22/218-286-balita-stunting-di-jabar-akses-makanan-bergizi-salah-satu-penyebab/>
- Sekoper Cinta Jabar. (2022). *Sekoper Cinta Episode 21 2022*. [https://www.youtube.com/watch?v=3DBoFrY6WdI&amp;t=1223s&amp;a\\_b\\_channel=SekoperCintaJabar](https://www.youtube.com/watch?v=3DBoFrY6WdI&amp;t=1223s&amp;a_b_channel=SekoperCintaJabar)
- Susanto, P. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender dan Affirmative Action dalam mendorong keterwakilan politik perempuan: Studi kasus anggota Parlemen Perempuan di DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024 [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <http://digilib.uinsgd.ac.id/59893/>